

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Target Pendapatan Meleset
Entitas / Cakupan : Kota Bandung
Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.3
Edisi : Rabu, 14 November 2018

Target Pendapatan Meleset

BANDUNG, (PR).-

Target Pendapatan Asli Daerah 2018 Kota Bandung diperkirakan tidak akan tercapai. Hal ini bisa berimbas pada penyertaan modal bagi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD).

"PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), PD Pasar, PD Kebersihan. Jadi mereka di posisi sulit untuk penyertaan modal karena target pendapatan tidak tercapai. Kecuali BJB, karena berlaku nasional harus dianggarkan kaitannya dengan kepemilikan saham," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Haru Suandharu, di Bandung, Selasa (13/11/2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 Kota Bandung dipatok sekitar Rp 2,6 triliun. Haru menuturkan, perkiraan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung memang targetnya tidak tercapai dan ada penurunan.

Haru menjelaskan, prediksi pendapatan Pemerintah Kota Bandung seharusnya rasional. Sementara saat ini masih banyak target pendapatan yang dipatok tinggi meski sebetulnya sulit direalisasikan.

"Misalnya dari retribusi parkir, untuk target 2018 Rp 80 miliar, hanya tercapai Rp 4 miliar, itu yang bikin kacau. Kemudian masalah salah

memprediksi DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus), meleset Rp 100 miliar. Untuk 2018 diprediksi Rp 600 miliar ternyata Rp 500 miliar. Itu juga masalah," ujarnya.

Hari ini, Rabu (14/11/2018), DPRD Kota Bandung akan mulai membahas Rancangan APBD 2019. Haru berharap Pemerintah Kota Bandung bisa lebih realistis dalam merancang proyeksi pendapatan pada masa mendatang.

Menurut Haru, banyak aspek yang harus diperbaiki ke depan supaya postur APBD Kota Bandung sehat. Apalagi jika anggaran surplus, bisa tersedia dana cadangan termasuk untuk penyertaan modal bagi BUMD.

"Mudah-mudahan Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung) bisa tercapai kesepakatan terhadap capaian target pendapatan, serta belanja prioritas. Yang tidak terlalu prioritas dicoret, supaya beban silpa dan defisit tidak terlalu besar," ujarnya.

Seperti diketahui, proyeksi APBD 2019 Kota Bandung mengalami defisit sekitar Rp 700 miliar. Dibandingkan dengan APBD 2018 yang mencapai Rp 6,6 triliun, APBD 2019 Kota Bandung diperkirakan ada di kisaran Rp 5,9 triliun. Selain itu, terdapat

anggaran Rp 800 miliar yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2018.

Penyelarasan

Bagi DPRD Kota Bandung, kata Haru, penyelarasan akan dilakukan secara intensif bersama Pemerintah Kota Bandung. Saat ini terdapat pengamatan peraturan dari pemerintah pusat. Perubahan itu meliputi aturan yang mewajibkan pengesahan APBD dilakukan satu bulan sebelum masa anggaran berakhir. Dengan demikian, APBD 2019 Kota Bandung harus sudah disahkan sebelum 30 November 2018.

Selain itu, kata Haru, APBD perubahan juga harus diputuskan tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Belajar dari APBD Perubahan 2018 yang ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, banyak mekanisme yang terlambat diantisipasi.

"Itu mekanisme yang harus diantisipasi. Kalau tidak hati-hati bisa lewat, pemberlakuan sanksi, dan lain-lain. Eksekutif juga harus sama-sama menyadari situasi ini sehingga menyampaikan draf tepat waktu. Toleransi ke eksekutif terlambat, semuanya dirugikan. Eksekutif harus tepat waktu dengan perencanaan yang harus baik," ujarnya. **(Muhammad Fikry Mauludy)*****